

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
CAKUPAN KELURAHAN *OPEN DEFECATION FREE* (ODF)
(STUDI KASUS KELURAHAN KAMPUNG LAUT,
KECAMATAN KUALA JAMBI, KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI)**

skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syari'ah**



Oleh:

SRI REJEKI

Nim : 162481

Pembimbing :

SITI MARLINA, S. Ag. MHI

NOFI NURMAN, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

1441 H / 2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rejeki
Nim : SIP. 162481
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Perum Alam Citra 2 Blok N12 Rt 021 Rw 00, Mekar Jaya
Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Upayah Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Cakupan Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) Studi Kasus Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar saya yang saya peroleh dari skripsi.

Jambi, 10 Desember 2020



SRI REJEKI
NIM. SIP162481

Pembimbing I : Siti Marlina, S. Ag. MHI
Pembimbing II : Nofi Nurman, M.Si
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS JAMBI
Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syariah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi
di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Sri Rejeki Nim. SIP. 162481 yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Cakupan Kelurahan *Open Defecation Free (ODF)* Studi Kasus Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi”** telah dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Siti Marlina, S. Ag. M.HI
NIP. 19750221 200701 2 015

Pembimbing II

Nofi Nurman, M.Si
NIDN. 201011703



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor ~~293~~/D.II./PP. 08 109 /2021

Tugas dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Daam Meningkatkan Cakupan Kelurahan *Open Defecation Free* (Odf) (Studi Kasus Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sri Rejeki
NIM : SIP162481
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 1 Maret 2021
Nilai Munaqasyah : 81(A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Drs. H. Ibnu Kasir, M.HI
NIP. 195612311991021001

Penguji I

Dr. H. Husin Bafadhal Lc, MA
NIP. 1971101420013121003

Penguji II

Wenny Destina, M.Si
NIP. 197601092005012006

Pembimbing I

Siti Marlina, S. Ag. M.HI
NIP. 197502212007012015

Pembimbing II

Nofi Nurman, M.Si
NIDN. 201011703

Sekretaris Sidang

Awwaluddin, S.Ag.
NIP. 196911202003121002

Jambi, 2021
Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H
NIP. 19720102 200003 1 005



MOTTO

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ
الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ
فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ (رواه الترمذي)

Artinya : Diriwayatkan dari Sa'ad Bin Abi Waqas dari ayahnya, dari Rasulullah SAW. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai Kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai Kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu (HR. Tirmizi).¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Syaikh A'bdul-Muhsin bin Hamd Al-A'bbad Al-Badr, Penjelasan 50 Hadits Inti Ajaran islam, (Maret 2012) , hlm. 23

ABSTRAK

Membuang Air Besar Sembarangan bisa menyebabkan beberapa penyakit yaitu Diare dan juga penyakit kulit, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup sehat dan bersih, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kelurahan Kampung Laut masih banyaknya warga yang menggunakan jamban yang tidak layak untuk di pakai, mereka menggunakan WC atau Toilet tetapi itu tidak layak untuk dipakai karena sebagian dari warga tidak menggunakan pipa untuk menyaring kotoran itu, dan secara tidak langsung kotoran itu akan mengalir ke air laut yang ada di Daerah Kampung Laut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mencakup Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut dan faktor munculnya kendala yang dihadapi pemerintah serta mengetahui solusi dari permasalahan penerapan untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penetian secara langsung untuk mendapatkan informasi melalui wawancara dengan informan penelitian. Dan hasil penelitian ini untuk meningkatkan program *open defecation free* Pemerintah Kelurahan Kampung Laut menerapkan bebecara yaitu dengan pendataan penduduk, memberikan sosialisasi, dan memberikan bantuan jamban sehat, dan di dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor pendukung, pertama kerjasama pemerintah, kedua dukungan dari masyarakat, dan fokter penghambat pemerintah yaitu koordinasi dengan instansi pemerintah, kondisi geografis Kelurahan Kampung Laut, budaya hidup sehat yang belum optimal, sumber daya manusia, solusi yang di berikan pemerintah yaitu dengan pemberian sanksi dan fasilitator.

Kata Kunci: Upayah, *Open Defecation Free*, Kelurahan Kampung Laut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampun Laut. Sholawat berserta salam dijunjungkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi Sarjana Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah penulis sendiri juga tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis merasa sangat perlu menyampaikan menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA. Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, MH. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., M.IR. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH. Wakil Dekan II, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH. M.



Hum. Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

5. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S. IP. M. Si. MSHS selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Bapak Yudi Armansyah, M Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Siti Marlina, S. Ag. MHI selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Nofi Nurman, M. Si selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi penulis.
8. Ibu Melisa, S. Stp selaku Lurah Kelurahan Kampung Laut, Zarlina, S. Ip selaku Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut, dan Herlina selaku Sekretaris Kelurahan Kampung Laut.
9. Bapak Darma Satria, S.Farm. ME. Apt selaku Kepala Puskesmas Kelurahan Kampung Laut, dan Bapak Rhomy. S, A.Md.KL selaku Pengawas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan Kampung Laut.
10. Bapak Rizki, Bapak Anton, Bapak Bambang, Bapak Ambo, selaku Masyarakat Kelurahan Kampung Laut.
11. Ibu Sari, Ibu Halima, dan Ibu Yuli selaku Masyarakat Kelurahan Kampung Laut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

12. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 terkhusus Ilmu Pemerintahan 8G. Teman teman KKN dan Teman kecilku Yang selalu mengingatkan dan menjadi teman seperjuangan dalam meraih gelar sarjana.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini untuk edisi yang akan datang. Dengan adanya skripsi ini kiranya dapat memotivasi kepada diri penulis pribadi khususnya dan para pembaca umumnya untuk membuat karangan karya ilmiah dimasa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberi hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah

Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik bagi anak-anaknya, tak banyak kata yang bisa kusampaikan kepada mu orang tua terhebatku Bapak Zainal dan Ibu Fatimah tercinta terima kasih telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, mendidik dan mengasihiku ku tanpa pernah merasa letih, serta telah berkorban seluruh jiwa dan raga demi membuat saya menjadi seorang anak yang lebih berarti lagi. semoga keluh kesah dan air mata kalian menjadi aliran sungai yang mengalir di surga Firdaus. Aamiin

Ungkapan terima kasih juga kepada:

Abang Ardi, Agok, Kakak Hikmah, Reni Abang ipar dan Kakak ipar ku semua yang selalu meyakinkanku, menjadikan aku sebagai adik yang paling beruntung di dunia karena memiliki Abang dan Kakak terhebat seperti kalian, yang selalu mensupport adiknya untuk terus mengejar cita-citanya. Selalu memberikan solusi dari segala masalah, dan karna mereka sampai di titik ini.

Tak luput pula ucapan terima kasih kepada

Hafiz As'ary yang selalu mendukungku, menyemangatiku memberikan solusi di setiap masalah, dan untuk teman-teman terbaikku Styah Wulandari, Saputri Afriya, Rts Mardiana, Rizki Ramadhan, Suryadi Akbar, yang selalu menyemangatiku untuk terus menggapai cita-cita yang selalu menemaniku selama di perkuliahan ini terimakasih untuk kalian semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	20

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Jenis dan Sumber Data	25
D. Unit Analisis.....	27
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Jadwal Penelitian.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa/Kelurahan	32
B. Aspek Geografis.....	35
C. Kondisi Demografis.....	36
D. Aspek Sosial.....	37





BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Penerapan *Open Defecation Free* (Odf) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kelurahan Kampung Laut..... 42
- B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi Pemerintah Kelurahan Kampung Laut Dalam Program *Open Defecation Free* (Odf)..... 51
- C. Solusi Pemerintah Dalam Meningkatkan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut..... 60

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 64
- B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

CURRICULUM VITAE.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. : Perkembangan Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar Sembarangan Kelurahan Kampung Laut.....	5
Tabel 2. : Jumlah Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Kuala Jambi.....	38
Tabel 3. : Jumlah Usaha Perdagangan di Kecamatan Kuala Jambi	39
Tabel 4. : Jumlah SD, SMP, Dan SMA Di Kecamatan Kuala Jambi Tahun 2019	41
Tabel 5. : Data Jumlah Pelaksanaan Program ODF Di Kelurahan Kampung Laut (2010-2019)	48
Tabel 6. : Perkembangan Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar Sembarangan Kelurahan Kampung Laut.....	50
Tabel 7. : Data Letak Geografis Dan Jumlah Rumah Tangga Kecamatan Kuala Jambi.....	55
Tabel 8. : jumlah Pegawai Pemerintah Kelurahan Kampung Laut.....	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. : Observasi Penelitian Bantuan WC umum	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Open Defecation Free (ODF) merupakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak lagi buang air besar di sembarangan tempat. Buang air besar sembarangan telah menjadi kebiasaan turun temurun yang susah untuk dirubah. Hal ini sangat tidak baik untuk kesehatan dan dapat mencemari lingkungan. Program ODF merupakan salah satu bidang kesehatan secara langsung merupakan kewenangan Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan badan-badan dan dinas-dinas yang terkait langsung maupun tidak langsung, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selaku badan yang bertugas mendampingi desa untuk menuntaskan ODF, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya selaku dinas yang membantu dalam membangun wc serta memberikan pinjaman cetakan closet.² Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2009, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur sub-sistem. Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan baik individu, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Tujuan sub sistem pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.

² Della Putri Arifianty, "Peran Pemerintah Lokal Dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat (Studi Tentang Kebersihan Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro)," *Jurnal Peran Pemerintah Lokal*, Vol. 03. No. 4, (Desember 2006), hlm. 6.

Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah perorangan, masyarakat, dan swasta menjadi inisiator, motivator, dan fasilitator, dengan dukungan para pemimpin baik formal maupun non formal.³

Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tetapkan sebagai salah satu Kabupaten Pelaksanaan program PPSP sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4500/VI/BANGDA tanggal 26 september 2011 perihal penetapan Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2013. Penetapan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penerima program PPSP menuntut adanya komitmen dan keseriusan seluruh pihak terkait dengan dibentuknya kelompok kerja (Pokja) PPSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 136/2012. Pokja Sanitasi bekerja sesuai tugas kewenangannya serta dapat menjadi penggerak utama kelancaran pelaksanaan program program percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kementrian Kesehatan menetapkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yaitu pada tahun 2014 dan di berlakukan di Indonesia untuk di setiap Daerah itu pada tahun 2015, dan di Daerah Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017, pemerintah menetapkan Tanjung Jabung Timur menjadi lokus stanting karena sanitasi di Tanjung Jabung Timur ini memang harus di benahi.⁴

³ Waryana, *Promosi Kesehatan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Nuha Medika,2016), hlm. 81.

⁴<http://www.slideshare.net/mobile/sudarmantostmsi/Buku-Putih-Sanitasi-Kabupaten-tanjung-jabung-timur>, akses 14 Februari 2020.



Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kampung Laut masih banyaknya warga yang menggunakan jamban yang tidak layak untuk dipakai, mereka menggunakan WC atau Toilet tetapi itu tidak layak untuk dipakai karena sebagian dari warga tidak menggunakan pipa untuk menyaring kotoran itu, dan secara tidak langsung kotoran itu akan mengalir ke air laut yang ada di daerah tersebut dan banyak anak yang mandi di air laut tersebut dan itu akan menyebabkan timbulnya penyakit salah satu penyakitnya yaitu penyakit kulit dan diare. Seperti yang kita ketahui standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban terdiri dari:

1. Bangunan atas jamban (dinding dan atau atap).
2. Bangunan tengah jamban (lubang tempat pembuangan kotoran, lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).
3. Bangunan bawah (tengki septik, cubluk).

Wawancara dengan Ibu Sari warga Kampung Laut, ia menjelaskan bahwa program bantuan jamban yang dilakukan oleh Pemerintahan sebagai berikut :

“Telah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat Kelurahan Kampung Laut membuang air besar sembarangan, baru beberapa tahun terakhir ini pemerintah melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan jamban sehat bagi masyarakat, walaupun sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh tetapi sedikit berdampak bagi masyarakat dan kami sekarang menjadi lebih tahu dampak buruk jika membuang air besar sembarangan, dan kami juga mendukung program pemerintah untuk stop buang air besar sembarangan”.⁵

⁵ Wawancara dengan Ibu Sari selaku warga Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 7 November 2020 di tempat tinggal warga.



Menurut Islam pentingnya menjaga kebersihan dalam berlingkungan maupun dalam menjaga kebersihan diri sendiri. Hal ini di jelaskan dalam Hadist yang di riwayatkan oleh HR. Tirmizi yang menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Berikut ini Hadist tentang kebersihan lingkungan hidup.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَنْظِفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ (رواه الترمذي)

Artinya : “Diriwayatkan dari sa’ad bin Abi Waqas dari ayahnya, dari Rasulullah SAW. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai Kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu (HR. Tirmizi)”⁶

Tahun 2014 telah diluncurkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar. STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku *higine* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Pemicuan adalah cara mendorong perubahan perilaku *higine* dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat. STBM terdiri dari lima pilar

⁶ <https://brainly.co.id/tugas/9778620>, akses 14 Februari 2020.



yaitu Stop BABS (ODF), cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (PAMM-RT), mengelola sampah rumah tangga, mengelola limbah cair rumah tangga.⁷

Tabel 1
Perkembangan Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar
Sembarangan Kelurahan Kampung Laut⁸

No	Tahun	Jenis Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar Kelurahan Kampung Laut		
		Jamban Sendiri	Jamban Umum	Tidak Memiliki Jamban
1.	2017	998	-	40
2.	2018	1,010	1	27
3.	2019	1,022	1	15

Dapat di lihat pada tabel di atas fasilitas tempat pembuangan air besar sembarangan di Kelurahan Kampung Laut mengalami peningkatan di setiap tahunnya, walaupun masih ada beberapa rumah yang tidak memiliki jamban/jamban tidak layak pakai, pemerintah masih mengupayakan untuk semua masyarakat Kelurahan Kampung Laut untuk memiliki jamban sendiri.

Pemerintah menetapkan *Open Defecation Free* (ODF) dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2009 dalam RPJMN tahun 2004-2009⁹

⁷ Wahyu Alfiatul Qudsiyah, Rahayu Sri Pujiati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Tingginya Angka Open Defecation (OD) di Kabupaten Jember," *Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 3. No. 2 (Mei 2015), hlm. 363.

⁸ Sumber Kantor Desa/Kelurahan Kuala Jambi

⁹ *Ibid*



kemudian dilakukan implementasi *Community Led Total Sanitation* (CLTS). Di Indonesia, pendekatan CLTS diperkenalkan pada tahun 2005 di 6 Kabupaten dan 6 Provinsi sebagai Daerah percontohan. Hasil yang di capai dalam waktu 18 bulan yaitu 130 Desa ODF. Tahun 2006 di lakukan replikasi CLTS oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, mencapai 160 Desa dan tahun 2007 mencapai 500 Desa.¹⁰

Pada November 2007, pemerintah telah menyelenggarakan Konferensi Sanitasi Nasional dengan agenda penyiapan langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi kedepan yang sejalan dengan pencapaian sasaran *MDGs*. Tahun 2008 bersamaan dengan *International Year Of Sanitation* (IYOS), pemerintah dan para *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan sanitasi menyetujui perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah di semua tingkatan pada pembangunan sanitasi, pada April tahun 2009, untuk mendorong akselerasi pembangunan sanitasi, pemerintah menyelenggarakan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi di masa depan. Program ini juga di maksudkan untuk memperkenalkan pendekatan strategi kota yang lebih terintegrasi untuk bisa diadopsi oleh pemerintah daerah.¹¹

Program PPSP adalah untuk mengutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor yaitu air limbah domestik, persampahan rumah tangga, dan juga drainase lingkungan, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015. Selanjutnya PPSP mendapatkan pengasan

¹⁰*Ibid*

¹¹ <https://tanjabtimkab.go.id/>, akses 23 Desember 2019.



pada Konferensi Sanitasi Nasional 11 yang di hadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Desember 2009.

Program PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh *stakeholder* dari kalangan pemerintah dan non pemerintah diseluruh tingkatan. Program ini setidaknya melibatkan 330 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi yang termasuk dalam kateogori rawan sanitasi, yang mencakup Kota Metropolitan besar dan sedang, Ibukota Provinsia, Kota-Kota yang berstatus otonom, serta kawasan perkotaan di Wilayah Kabupaten /Kota. Dengan demikian, pelaksanaan program PPSP membutuhkan sumberdaya yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2014.¹²

Beberapa penyakit yang di sebabkan oleh Sanitasi:

1. Kolera adalah penyakit diare akut yang di sebabkan oleh infeksi usus karena bakteri *vibrio cholera*.
2. Demam tifoid adaalah penyakit yang di sebabkan oleh bakteri *salmonella typhi*.
3. Diare adalah suatu kondisi kesehatan yang di sebabkan oleh infeksi mikroorganisme termasuk bakteri, virus dan parasit lainnya seperti jamur, cacing dan *protozoa*.
4. Disenteri adalah diare berdarah yang di sebabkan oleh *shigella*.¹³

Pemerintah mengharapkan dengan di berlakukannya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini agar meningkatkan akses Sanitasi Masyarakat

¹²*Ibid*

¹³<http://dpupkp.bantulkab.go.id/berita/205-dampak-sanitasi-buruk>, akses 17 Februari



yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan STBM dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.¹⁴

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan desa *open defecation free* (ODF) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang di harapkan serta dapat memberi panduan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten. Atas dasar itulah penulis mengadakan penelitian dengan judul : **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Cakupan Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) (Studi Kasus Kelurahan Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *open defecation free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah Kelurahan Kampung Laut dalam program *Open Defecation Free* (ODF) ?
3. Bagaimana solusi pemerintah dalam meningkatkan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut ?

¹⁴ Permenkes Nomor 3Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, penjelasan umum



C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian ini pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya Penerapan Pemerintah Kelurahan Kampung Laut dalam program *Open Defecation Free* (ODF), dimulai dari tahun 2008 di terapkannya program *Open Defecation Free* di Kelurahan Kampung Laut, pemberian bantuan jamban sehat dan juga WC umum, faktor penghambat program *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut, serta solusi Pemerintah Kelurahan Kampung Laut untuk meningkatkan program *Open Defecation Free* (ODF). Maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala jambi pada tahun 2017-2018.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui penerapan *open defecation free* (ODF) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kelurahan Kampung Laut
2. Ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam menjalankan program desa *open defecation free* di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Ingin mengetahui solusi pemerintah dalam meningkatkan *open defecation free* di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kelurahan Kampung Laut.



b. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan desa *open defecation free* (ODF) di kabupaten tanjung jabung timur .
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di jurusan ilmu pemerintahan fakultas syariah UIN STS Jambi dan juga pemerintah Kabupaten serta masyarakat umum mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan kelurahan *open defecation free* (ODF) di kabupaten tanjung jabung timur.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Dalam rangka penyusunan skripsi ini maka penulis menggunakan seperangkat teori yang merupakan sebuah pijakan bagi penulis dalam penelitian ilmiah agar dapat mengamati, meneliti dan menelaah gejala serta peristiwa yang akan diangkat dari lapangan dengan berdasarkan teori-teori yang dapat memudahkan penulis untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di lapangan dari yang seharusnya dan sebaiknya menurut teori-teori tersebut.



1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah istilah yang sangat dinamis, seperti yang ditunjukkan oleh Eulau dan Prewitt berikut ini, apa yang kebanyakan dilihat dari pengamat kebijakan pada satu saat tertentu adalah suatu tingkatan atau tahapan dari serangkaian peristiwa pengembangan kebijakan dan juga kebijakan dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan, dan pilihan-pilihan kebijakan.¹⁵

Menurut Edwards II dan Sharkansy mengemukakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan”. Sesungguhnya kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Carl Friedrich mengatakan bahwa: “kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan”.¹⁶

Edwards III mengemukakan “bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan”.¹⁷

¹⁵ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 48.

¹⁶ Yulianto Kadji, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo; UNG Pers, 2015), hlm. 9

¹⁷ *Ibid*



Menurut Edi Suharto kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan yang menyangkut aparatur Negara dalam pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah untuk secara langsung mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik biasanya disebut juga sebagai kebijakan publik. Kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik biasanya disebut juga sebagai kebijakan publik.¹⁸

Menurut Laswell dalam pengantarnya, “ilmu kebijakan” tidak dibatasi oleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki orientasi praktis yang mendasar. Tujuan dari ilmu-ilmu kebijakan tidak sekedar untuk memberikan sumbangan pada pembuatan keputusan yang lebih efisien, tetapi juga memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan demokrasi.¹⁹

Menurut Keban menjelaskan bahwa “*publik policy*” dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sesuatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses kebijakan dipandang sebagai suatu cara di mana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja kebijakan merupakan

¹⁸ Edi Suhato, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, cet.ke-3*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm, 3.

¹⁹ William N Dun, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 70



suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasi.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.²⁰

Menurut Chandler dan Plano mengemukakan bahwa "kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan". Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Dye pengertian dasar dari kebijakan publik "*public policy is whatever governments choose to or not to do*"(kebijakan publik adalah apa yang dilakukan maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah). Kebijakan itu merupakan upaya untuk memahami: apa yang dilakukan dan atau yang tidak

²⁰ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*,(Jakarta; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hlm. 3.



dilakukan oleh pemerintah, apa penyebab atau yang mempengaruhinya, apa dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Menurut James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintahan) atau aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitannya dengan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.²¹

2. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal, menurut Campbell J.P. pengukuran efektifitas secara umum dan paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan diteliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut. Dalam mengukur efektivitas akan dilakukan dengan teliti karena tujuan program yang berobyek pada masyarakat sangat luas dan abstrak.²²

²¹Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 17.

²²Yudhi Iestana, "Efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015" *jurnal ilmu pemerintahan dan kebijakan publik*, Vol. 03. No. 3, (Oktober 2016), hlm. 373.



Hidayat menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

3. Teori Problem Solving

Problem solving adalah salah satu bagian dari proses berfikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi problem solving digunakan secara efektivitas dalam psikologi kognitif, untuk mendeksripsikan semua bentuk dari kesadaran pengertian/kognisi. Anderson misalnya mengklasifikasikan semua perilaku yang diarahkan kepada tujuan (yang disadari atau tidak disadari) sebagai *problem solving*, jika Wickelgren mendefinisikan problem solving sebagai upaya untuk mencapai tujuan khusus, maka Van Dijk menyatakan bahwa problem solving terjadi bila pencapaian tujuan tertentu masyarakat kinerja dan langkah langkah mental tertentu. Bagi Palumbo problem solving adalah fungsi dari cara bagaimana stimulus tertentu menjadi in-put melalui sistem sensori ingatan, di proses dan dikoding melalui memori kinerja.²³

Girl dkk menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penerapan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk mencapai tujuan, sedang menurut Gagne & Brigss unjuk kerja pemecahan masalah itu berupa penciptaan dan penggunaan aturan yang kompleks dan lebih tingkatnya, untuk mecapai solusi masalah.

Menurut Marzano *problem solving* adalah salah satu bagian dari proses berfikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi

²³Bambang Suteng Sulasamono, "Probleng solving, Signifikasi, Pengertian dan Ragamnya" *jurnal fkip universitas kristen satya wacana*, Vol. 28. No. 2, (Desember 2012), hlm. 161.



problem solving digunakan secara ekstensif dalam psikologi kognitif, untuk mendeskripsikan, jika Wickelgren mendefinisikan *problem solving* sebagai upaya untuk mencapai tujuan khusus, dikutip Marzano dkk menyatakan bahwa *problem solving* terjadi bila pencapaian tujuan tertentu masyarakat kinerja dan langkah langkah mental tertentu.²⁴

Jadi, istilah pemecahan masalah secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai terjemahan dari istilah *problem solving*, istilah pemecahan masalah dalam bahasa Indonesia bermakna ganda yaitu proses memecahkan masalah itu sendiri dan hasil dari upaya memecahkan masalah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *solution* atau solusi.²⁵

4. Pengertian *Open Defecation Free* (ODF)

Open Defecation Free (ODF) merupakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak lagi buang air besar di sembarangan tempat. Buang air besar sembarangan telah menjadi kebiasaan turun temurun yang susah untuk dirubah. Hal ini sangat tidak baik untuk kesehatan dan dapat mencemari lingkungan. Program ODF merupakan salah satu bidang kesehatan secara langsung merupakan kewenangan Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan badan-badan dan dinas-dinas yang terkait langsung maupun tidak langsung, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selaku badan yang bertugas mendampingi desa untuk menuntaskan ODF, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya selaku dinas yang membantu dalam membangun wc serta memberikan pinjaman

²⁴ Bambang Suteng Sulasamono, "Problem Solving Signifikasi, Pengertian dan Ragamnya" *jurnal universitas kristen satya wacana*, Vol. 28 No. 2, (Desember 2012), hlm 161

²⁵ *Ibid.*



cetakan closet.²⁶ Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2009, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur sub-sistem. Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan baik individu, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Tujuan sub sistem pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah perorangan, masyarakat, dan swasta menjadi inisiator, motivator, dan fasilitator, dengan dukungan para pemimpin baik formal maupun non formal.²⁷

Berdasarkan paradigma sehat ditetapkan visi Indonesia sehat 2010, ada 3 (tiga) pilar yaitu perlu perhatian khusus, lingkungan sehat, perilaku sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Untuk perilaku sehat bentuk konkritnya yaitu perilaku proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan. Mencegah terjadi resiko penyakit, melindungi diri dari penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam upaya kesehatan.

Mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia melalui kementerian kesehatan Republik Indonesia telah mengembangkan dokumen strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM.

²⁶ Della Putri Arifianty, "Peran Pemerintah Lokal Dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat (Studi Tentang Kebersihan Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro)," *Jurnal Peran Pemerintah Lokal*, Vol. 03. No. 4, (Desember 2006), hlm. 6.

²⁷ Waryana, *Promosi Kesehatan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), hlm. 81.



Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, yang menjadikan STBM sebagai Program Nasional dan merupakan salah satu sasaran utama dalam RPJMN 2010-2014, yang menargetkan bahwa pada akhir tahun 2014, tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang melakukan praktik buang air besar sembarangan.²⁸

3. Pelaksanaan Program *Open Defecation Free* (ODF)

Akses masyarakat terhadap sarana sanitasi khususnya jamban, saat ini masih jauh dari harapan. Berbagai kampanye dan program telah banyak dilakukan, terakhir dengan pemberlakuan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Berbagai upaya tersebut sebetulnya bermuara pada terpenuhinya akses sanitasi masyarakat, khususnya jamban. Namun akses tersebut selain berbicara kuantitas yang terpenting adalah kualitas.²⁹

Sanitasi merupakan perilaku yang di sengaja untuk membudayakan hidup bersih. Sanitasi bertujuan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran serta bahan buangan berbahaya lainnya. Usaha ini diharapkan dapat menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanitasi sejalan dengan usaha pencapaian derajat kesehatan. Ini terlihat dari batasan “mencegah manusia berhubungan langsung dengan kotoran serta bahan buangan berbahaya lainnya”. Dimana keduanya juga merupakan unsur lingkungan. Bahaya yang di maksudkan pada definisi tersebut melalui fisik, mikrobiologi, kimia, atau biologis yang menyebabkan masalah

²⁸ Verdiana Dwi Juniantin, “Kajian Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2014”, Skripsi Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Tahun 2014, hlm. 3.

²⁹ Siti Sholikhah, “Hubungan Pelaksanaan Program ODF(*open defecation free*) dengan Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Buang Air Besar di Luar Jamban di Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012,” *Jurnal Surya*, Vol. 02. No. XVII, (juni 2014), hlm. 88.



kesehatan. Selain itu, bahan bangunan lainnya dapat berupa sisa bahan buangan padat, air bahan bangunan domestik (air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri, dan perhatian.

WHO (*Who Health Organization*)

1. Pengawasan penyediaan air mium masyarakat
2. Pembuangan tinja dan air limbah
3. Pembuangan sampah
4. Faktor penyakit
5. Kondisi perumahan
6. Penyediaan dan penanganan makanan
7. Kondisi atmosfer
8. Keselamatan kerja³⁰

4. STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Sanitasi total sendiri adalah sebuah kondisi, ketika suatu komunitas mampu melakukan hal-hal berikut.

1. Tidak membuang air besar (BAB) sembarangan
2. Mencuci tangan dengan sabun
3. Mengelola air minum dan makanan yang aman
4. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman

³⁰ Apri Fitriani, *kesehatan masyarakat sanitasi dan lingkungan*, (Surakta: PT. Borobudur Inspirasi Nusantara , 2016), hlm. 19.



Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Strategi Nasional STBM memiliki indikator *outcome* atau hasil berupa menurunnya kejadian penyakit diare menurunnya kejadian penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi serta perilaku. Sedangkan indikator *output*-nya adalah sebagai berikut :

1. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar, sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF).
2. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
3. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam salah satu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci dengan benar.
4. Setiap rumah tangga mengelola limbah dan sampahnya dengan benar.³¹

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka, sesuai dengan judul di atas yaitu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan desa *open defecation free* (ODF) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur penulis melakukan tinjauan pustaka dan observasi pustaka di antaranya adalah sebagai berikut:

³¹Apri Fitrianti, *Kesehatan Masyarakat Sanitasi dan Lingkungan*, (2016), hlm. 21.



Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Verdiana Dwi Junianti yang berjudul **“Kajian Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2014”** Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Kesimpulan penyelenggaraan STBM pada saat pemicuan di Desa Jelbuk telah sesuai dengan panduan pada Permenkes Nomor 3 Tahun 2015. Target STBM di Desa Jelbuk yaitu pencapaian 891 KK menjadi ODF. Strategi yang di gunakan adanya seorang fasilitator dalam pelaksanaan STBM masih mendatangkan dari puskesmas lain,³²

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rena Ratri Anggoro yang berjudul **“Gambaran Perilaku Buang Air Besar Sembarangan pada Masyarakat Desa Jatimulyo, Kabupaten Bojonegoro”** kesimpulan masih banyaknya masyarakat Jatimulyo yang tidak memiliki jamban sehingga harus buang air besar di sungai perlu adanya pemicu dan sosialisasi lebih lanjut dari tenaga kesehatan serta pemerintah desa untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki jamban dan dan melakukan buang air besar di jamban.³³

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Muhti Burrahman yang berjudul **“Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pengelolaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Bersih Dan Sehat (Studi Di Kantor Camat Pelayung)”** kesimpulan penilitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kecamatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan yang menjadi

³² Verdiana Dwi Juniantin, “Kajian Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2014”, Tahun 2015. Hlm. 40.

³³ Rena Retri Anggoro, “Gambaran Perilaku Buang Air Besar Sembarangan pada Masyarakat Desa Jatimulyo, Kabupaten Bojonegoro”, Tahun 2017.



fokus penelitian ini adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan kerikil di Kecamatan Pemayung.³⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Siti Fatonah yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Pertama (Stop Babs) di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2015”** kesimpulan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program sanitasi total berbasis masyarakat pilar pertama (*Stop BABS*) di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2015 rendah karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung yaitu masih terjadi abrasi di Desa Purwosari dan perilaku masyarakat yang kurang baik yaitu sudah menjadi kebiasaan dari kecil bahwa buang air besar di tempat terbuka / BABS sudah biasa masyarakat lakukan.³⁵

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan seperti skripsi diatas, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu, sama-sama meneliti masalah lingkungan dan stop buang air besar sembarangan atau *open defecation free*, selanjutnya yang membedakan dengan penelitian saya adalah dimana penelitian saya berfokus terhadap upaya pemerintah Kelurahan Kampung Laut untuk meningkatkan stop buang air besar sembarangan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penetian secara langsung untuk mendapatkan informasi melalui wawancara dengan informan penelitian. Dan hasil penelitian ini untuk

³⁴Muhti Burrahman, “*Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pengelolaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Bersih Dan Sehat (Studi Di Kantor Camat Pemayung) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*”, Tahun 2018.

³⁵Nurul Siti Fatonah, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Pertama (Stop Babs) di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*”, Tahun 2016, hlm. 88.



meningkatkan program *open defecation free* Pemerintah Kelurahan Kampung Laut menerapkan bebecara yaitu dengan pendataan penduduk, memberikan sosialisasi, dan memberikan bantuan jamban sehat, dan di dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor pendukung, pertama kerjasama pemerintah, kedua dukungan dari masyarakat, dan faktor penghambat pemerintah yaitu koordinasi dengan instansi pemerintah, kondisi geografis Kelurahan Kampung Laut, budaya hidup sehat yang belum optimal, sumber daya manusia, solusi yang di berikan pemerintah yaitu dengan pemberian sanksi dan fasilitator.

Setelah adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan stop buang air besar sembarangan di Kelurahan Kampung Laut mengalami peningkatan dari tahun 2017 s/d 2019 tetapi masih belum dapat di lakukan secara menyeluruh. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk meneliti hal tersebut supaya bisa menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi peneliti sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³⁶Selain itu penelitian juga merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu kebenaran.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kampung Laut, di mulai dari tanggal 7-17 November 2020, adapun tempat penelitiannya yaitu di Kantor Lurah Kelurahan Kampung Laut, Puskesmas Kelurahan Kampung Laut dan Pesantren Warisan Rasulullah Kelurahan Kampung Laut, yang penulis harapkan dapat membantu menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan informasi melalui wawancara dengan informan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena lebih tepat untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu berbentuk metode kualitatif deskriptif. Menurut Soerjono

³⁶ Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, Cet: Ke-1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.



Sukanto, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³⁷

C. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Contoh: data kuesioner (data yang diperoleh melalui kuesioner), data survei, data observasi dan sebagainya.³⁸ Adapun data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung dan observasi. Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Data primer yang diteliti adalah informasi-informasi yang di peroleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara dan observasi mengenai pokok permasalahan dalam penelitian secara langsung kepada petugas pemerintah, lembaga-lembaga dan masyarakat yang bersangkutan maupun pihak-pihak tertentu. Bapak Darma Satria, S.Farm. ME. Apt, Bapak Rhomy. S, A. Md. Kl Ibu Melisa, S. Stp, Ibu Zarlina, S. Ip, dan Ibu Herlina, Bapak Rizki, Bapak Anton, Bapak Bambang, Bapak Ambo, Ibu Sari, Ibu Halima, Ibu Yuli Data primer ini

³⁷ Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariahpess, 2014), hlm. 32.

³⁸ Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksra, 2004), Hlm. 19



digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan desa *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Contohnya, yaitu data yang sudah tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti perpustakaan, BPS, kantor-kantor, dan sebagainya.³⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Kampung Laut, Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut, Sekretaris Kelurahan Kampung Laut, Kepala Puskesmas Kelurahan Kampung Laut, Pengawas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan Kampung Laut, Masyarakat Kelurahan Kampung Laut, dokumen-dokumen, dokumen kantor yang terkait dengan permasalahan yang dibahas penulis maupun bahan perpustakaan lainnya.

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

- 1) Pegawai pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan permasalahan judul penulis.
- 2) Masyarakat

³⁹ Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, hlm. 22



- 3) Artikel, buku, dokumen dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta atau sekelompok orang.⁴⁰ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dan masyarakat. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang digunakan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dan wawancara.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah instrument untuk mendapatkan data utama dalam upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan desa *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih obserasi partisipatif.

⁴⁰ Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: SyariahPresss, 2014), hlm. 48.



b. Wawancara

Bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, serta gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman dan ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pegawai pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersangkutan maupun pihak-pihak tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Informan yang di wawancarai

No	Nama	Jabatan
1	Melisa, S. Stp	Lurah Kelurahan Kampung Laut
2	Zarlina, S. Ip	Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut
3	Herlina	Sekretaris Kelurahan Kampung Laut
4.	Darma Satria, S.Farm. ME. Apt	Kepala Puskesmas Kelurahan Kampung Laut
5.	Rhomy. S, A. Md. KL	Pengawas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan Kampung Laut

⁴¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Grasindo,2002), hlm. 119.



6.	Bapak Rizki	Pedagang
7.	Bapak Anton	Pedagang
8.	Bapak Bambang	Pedagang
9.	Bapak Ambo	Buruh
10.	Ibu Sari	Ibu Rumah Tangga
11.	Ibu Halima	Pedagang
12.	Ibu Yuli	Ibu Rumah Tangga

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴² Secara garis besar cara yang digunakan dalam menganalisis data-data penelitian ini adalah :

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan RNB, (Bandung: AlfaBeta, 2013), hlm. 137.



a. Analisis Domain

Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Diperoleh dengan pertanyaan *grand* dan *minotaur*. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk peneliti selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.

b. Analisa Taksonomi

Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus.

c. Analisis Komponensial

Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan.⁴³

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND, (Bandung: Alfa Beta, 2017), hlm. 255.



G. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2019/2020																				
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Pembuatan Proposal																					
3.	Perbaikan Proposal dan Seminar																					
4.	Surat Izin Riset																					
5.	Pengumpulan Data																					
6.	Pengolahan Data																					
7.	Pembuatan Laporan																					
8.	Bimbingan dan Perbaikan																					
9.	Agenda dan Ujian Skripsi																					
10.	Perbaikan dan Perjilidan																					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa/Kelurahan

Secara administrasi Kelurahan Kampung Laut merupakan bagian dari Kecamatan Kuala Jambi sebelumnya. Kelurahan Kampung Laut ini Kelurahan ini dulunya termasuk bagian dari Desa Kampung Laut Kecamatan Muara Sabak. Namun dengan pemekaran wilayah maka dengan sendirinya Desa Kampung Laut terbagi menjadi 2 (2) Kelurahan yakni Kelurahan Kampung Laut dan Kelurahan Tanjung Solok. Terletak di daerah pesisir laut pada ketinggian 1(satu) meter di atas permukaan laut.

Petani kelapa/pinang mendominasi sebagai mata pencaharian masyarakat dengan persentase paling besar kemudian disusul dengan nelayan dan wiraswasta beserta PNS diurutan selanjutnya yang menjadi buruh tani, dagang dan tukang. Jadi tidak semua keluarga yang ada di Kelurahan ini mempunyai lahan perkebunan. Tidak mengherankan bahwa masyarakat banyak yang terjun ke sektor perikanan dan kelautan, karena inilah keahlian dan akses masyarakat yang mudah di jangkau, namun mereka masih terkendala dengan peralatan dan perlengkapan penangkapan ikan sangat mahal sehingga biaya operasional mereka besar.⁴⁴

Pada umumnya penduduk kelurahan ini berasal dari suku Melayu, Bugis dan selebihnya Suku Jawa dan sebagian kecil dari berasal dari suku Banjar, Madura dan lain-lain. Kehidupan sehari-hari masyarakat berjalan dengan baik, saling

⁴⁴ Buku Program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2018, hlm. 33.



hormat menghormati dan saling membantu antar suku. Jarang terjadi keributan antar suku maupun antar individu. Jika ada salah satu keluarga yang kemalangan maka dengan sendirinya masyarakat akan bersimpati dan rela meninggalkan pekerjaannya, begitu juga jika ada acara-acara perkawinan, cukuran maupun hajatan yang lain sebisa mungkin masyarakat akan menghadiri acara tersebut.

Kondisi kelembagaan di Kelurahan ini sebagian ada yang berjalan baik seperti pengajian ibu-ibu yang rutin dilakukan setiap minggu begitu juga dengan organisasi kepemudaan yang masih ada kegiatan dibidang olah raga. Untuk kelembagaan pemerintah seperti lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) belum berfungsi dengan maksimal. Sementara lembaga yang besar manfaatnya bagi masyarakat seperti koperasi dan kelompok tani/nelayan tidak berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana fisik di Kelurahan Kampung Laut sebagian besar terkendala dengan infrastruktur jalan, jembatan dan tambatan perahu/dermaga. Jalan utama masuk Kelurahan sudah jalan aspal, sementara jalan lingkungan Kelurahan sebagian besar sudah semenisasi selebihnya masih berupa jalan jerambah kayu yang rentan dengan kerusakan. Sama halnya dengan diatas kondisi jembatan yang ada di Kelurahan ini sudah cukup baik namun namun tambatan perahu/dermaga/pelabuhan muali rusak karena lapuk dan tergerus arus pasang surut.⁴⁵

Sementara untuk sarana fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menahan air masuk ke areal perkebunan yaitu tanggul belum ada sehingga tanaman kelapa banyak yang rusak dan ini akan mempengaruhi pendapatan

⁴⁵ Buku Program Dana Alokasi Lingkungan Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2018, hlm. 34.



petani. Sarana dan prasarana air bersih di Kelurahan ini belum memadai karena masyarakat masih tergantung kepala sumber air bersih di Kelurahan ini belum memadai karena masyarakat masih tergantung kepada sumber air hujan yang di gunakan untuk minum dan memasak. Sedangkan untuk keperluan mandi, cuci dan kakus masyarakat mengandalkan sumur pompa yang jumlahnya masih terbatas sehingga sebagian warga jauh dari sarana tersebut. Sementara untuk sanitasi lain seperti WC dan saluran air, sebagian besar masyarakat masih menggunakan dan kamar mandi dan WC sederhana tanpa saluran air pembuangan dan septik tank yang tentunya ini akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat pada umumnya.

Sarana lain secara fisik ada yang layak seperti Kantor Kelurahan, Puskesmas, dan Masjid serta Langgar tetapi untuk sanitasi air bersih dan MCK belum layak pakai. Sarana pendidikan yang dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kelurahan ini merupakan pusat pendidikan Kecamatan mulai dari PAUD sampai dengan SLTA baik itu negeri maupun swasta ada disini dimana kondisinya cukup baik. Bangunan sekolah ini sebagian besar sudah permanen. Sementara kondisi perumahan untuk guru dan sanitasi air bersihnya sangat minim sehingga akan mempengaruhi proses belajar. Sementara sarana untuk pendidikan keagamaan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendidik anak-anak menjadi manusia yang beriman dan bermoral seperti madrasah sudah ada di Kelurahan ini.⁴⁶

⁴⁶ Buku program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2018, hlm. 35



B. Aspek Geografis

Secara administrasi Kelurahan Kampung Laut yang berdiri sejak tahun 2007 termasuk dalam Kecamatan Kuala Jambi yang beribukota Kampung Laut. Kelurahan ini terbagi menjadi 4 (empat) RW dan 20 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Kampung Laut mempunyai luas wilayah 40,56 Km² dengan batas wilayah :

1. Utara berbatasan dengan : Kelurahan Tanjung Solok
2. Selatan berbatasan dengan : Desa Majelis Hidayah
3. Timur berbatasan dengan : Sungai Batanghari
4. Barat berbatasan dengan : Desa Kuala Lagan

Jarak Kelurahan ini dengan ibukota Kecamatan adalah 1 km dengan kondisi jalan berupa jalan makadam dan jarak dengan ibukota kabupaten ± 30 km dengan kondisi sebagian jalan makadam dan sebagian jalan aspal.

Kebutuhan penggunaan lahan di Kelurahan ini sebagian besar berupa tanah rawa-rawa, pertanian/perkebunan rakyat dengan luas 27,56 Km² sementara sisanya untuk lahan pekarangan/perumahan dan non pertanian lainnya seluas 10 Km². Untuk sarana perkantoran ada seluas 2 Ha.

Sumber utama penghasilan sebagian besar penduduk adalah sektor perkebunan subsektor kebun kelapa dalam dan pinang serta sektor perikanan dan kelautan. Hanya ada sebagian kecil yang menjadi buruh, pedagang, tukang dan usaha sarang burung walet. Tingkat ekonomi Kelurahan bisa digolongkan menengah kebawah, hal ini disebabkan penghasilan masyarakat yang tidak tetap



oleh karena harga komoditi yang tidak tetap. oleh karena harga komoditi yang tidak stabil dan kondisi cuaca yang tidak menentu.⁴⁷

C. Kondisi Demografis

Kelurahan Kampung Laut berpenduduk 4.081 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1.912 jiwa dan 2.169 jiwa penduduk perempuan. Terdiri dari 1.047 KK dengan kepadatan penduduk 120,98 jiwa/Km². Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani kebun kelapa dan pinang. Urutan selanjutnya adalah nelayan, peternak, pedagang, PNS, buruh dan lainnya. Seta angkatan kerja muda kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bisa dikatakan pengangguran terselubung.

Dalam sektor lapangan usaha masyarakat Kelurahan Kampung Laut, tidaklah berbeda jauh dari mayoritas penduduk dalam wilayah Kecamatan Kuala Jambi, setiap sektor lapangan usaha senantiasa membawa pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) masyarakat, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pula bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Kelurahan Kampung Laut untuk saat ini masih berbentuk satu pola yakni non perkotaan, artinya masih terfokus pada sektor pertanian dan perkebunan sedangkan untuk sektor lainnya seperti usaha perdagangan, perikanan, peternakan seperti pada umumnya masyarakat pesisir pantai dalam Kecamatan Kuala Jambi bukan merupakan usaha pokok dan hanya sebatas usaha sampingan, khusus untuk masyarakat Kelurahan Kampung Laut sesuai dengan kondisi geografisnya pertanian dan perkebunan merupakan mata pencaharian pokok.

⁴⁷ Buku Program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2018, hlm. 36



Sejalan dengan hal tersebut diatas, kebijakan perencanaan pemerataan pembangunan untuk sarana dan prasarana pendukung kedua sektor tersebut sangatlah dominan guna pemenuhan dan perbaikan hasil produksi serta pola pemasaran yang terkelola dengan baik dan stabil dengan harapan kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin hari semakin menunjukkan angka perbaikan. Tidak menutup kemungkinan untuk sektor sektor perekonomian lain yang merupakan potensi yang dimiliki wilayah dapat dikembangkan secara optimal dan dapat diupayakan terkelola dengan baik.

Denyut nadi perekonomian Kelurahan Kampung Laut tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang sifatnya sangat mendesak sehingga kebutuhan tersebut merupakan pokok dari segala sektor dan sendi-sendi perekonomian masyarakat, sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah baik pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat bahwa perencanaan penanganan dan pembangunan daerah aliran air berupa penanggulangan merupakan salah satu program pemerintah yang sangat diharapkan guna untuk pemulihan kondisi lahan perkebunan dan pertanian masyarakat yang selalu diresahkan dengan debit volume air pasang yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan selalu menggenangi lahan perkebunan dan pertanian masyarakat.⁴⁸

D. Aspek Sosial

1. Ekonomi

Secara mayoritas masyarakat Kelurahan Kampung Laut bermata pencaharian nelayan dan petani, mereka berekebun pinang, kelapa, dan juga kelapa sawit. Disamping bermata pencaharian sebagai nelayan dan juga petani ada

⁴⁸ Buku Program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2018, hlm 37



juga pedagang. Ada juga penduduk yang bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, peternak, buruh, dan wiraswasta.

Secara umum kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Kampung Laut menengah kebawah. Kondisi ekonomi Kelurahan Kampung Laut sendiri di bagi menjadi dua. Masyarakat yang berada dibagian dalam tergolong ekonomi menengah kebawah, hal ini terlihat dari pekerjaan mereka sebagai buruh tani, nelayan kecil yang masih menggunakan kendaraan dan alat tangkap tradisional. Selain itu kendaraan dan alat tangkap juga berasal dari pemberian pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur lengkap dengan tempat tinggal mereka yang melalui program bedah rumah. Dan masyarakat bagian luar/tepi laut memiliki kondisi ekonomi menengah keatas dilihat dari kepemilikan kebun kelapa serta memiliki usaha seperti, konter, kafe, dan penjual pakaian, jika dilihat dari lain sisi, mayoritas mereka memiliki asuransi, seperti rumah.⁴⁹

Pada tahun 2018 di Kecamatan Kuala Jambi jumlah industri dan usaha rumah tangga sebanyak 172 usaha.

Tabel 2
Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja di Kecamatan Kuala Jambi, 2018⁵⁰

Desa/kelurahan	Perusahaan Besar dan Menengah		Industri Kecil dan URT	
	Jml Total	Pekerja	Jml Total	Pekerja
Teluk Majelis	-	-	28	28
Kampung Laut	-	-	39	39
Tanjung Solok	-	-	41	41
Kuala Lagan	-	-	19	19
Majelis Hidayah	-	-	28	28
Manunggal Makmur	-	-	17	17

⁴⁹ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur, *Kuala Jambi Dalam Angka 2019*, hlm. 31.

⁵⁰ *Ibid*



Jumlah/Total	-	-	172	172
---------------------	---	---	------------	------------

Tabel 3

Jumlah usaha perdagangan di Kecamatan Kuala Jambi, 2018

Desa/Kelurahan	Mini Market	Pasar Hewan	Toko/Warung
Teluk Majelis	-	-	18
Kampung Laut	-	-	32
Tanjung Solok	-	-	42
Kuala Lagan	-	-	23
Majelis Hidayah	-	-	21
Manunggal Makmur	-	-	15
Jumlah Total	-	-	151

Dari tabel data penduduk dan ketenaga kerjaan, Kelurahan Kampung Laut berada di posisi no dua setelah Kelurahan Tanjung Solok, baik itu dari jumlah penduduk maupun jumlah toko/warung, akan tetapi Kelurahan Kampung Laut berada di posisi pertama untuk kepadatan km² dengan luas area 13,61 dengan kepadatan 323,51.

2. Adat Istiadat

Masyarakat Kecamatan Kuala Jambi yang berasal dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra sendiri, mereka masih memakai adat istiadat yang berbau tempat asal mereka atau suku mereka seperti adat perkawinan, khitanan, dan kematian.⁵¹

Masyarakat Kecamatan Kuala Jambi yang di dalamnya terdapat beraneka ragam sukunya. Mereka tetap melaksanakan adat kebiasaan yang masih terlihat adalah dalam acara perkawinan dari segi tata cara mulai dari makanan atau pengajian atau pakaian pengantin dan lain-lain. Bahasa sehari-hari yang

⁵¹ *Ibid*



digunakan masyarakat Kuala Jambi adalah bahasa melayu dengan vocal huruf E dibelakangnya seperti: kemana-kemane, siapa-siape, mengapa-ngape, suka-suke dan lain sebagainya bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Malaysia. Bahasa tersebut digunakan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lain suku. Walaupun terkadang mereka masih menggunakan bahasa suku mereka masing-masing apabila berbicara dengan sesama sukunya seperti bahasa Banjar, Bugis, Batak, Cina dan Minang.

Di Kecamatan Kuala Jambi telah terjadi percampuran adat istiadat antara suku, kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia, seperti dalam pertemuan-pertemuan, dalam rapat dan dalam pendidikan yang didalamnya ada orang Jawa, Bugis, Padang, Medan, Banjar, dan Melayu. Bukan hanya itu dalam tata cara perkawinan ataupun penyajian menu makanan sudah mengalami percampuran.

3. Pendidikan

Jumlah sekolah di Kecamatan Kuala Jambi tahun 2019 adalah⁵² :

a. Sekolah Dasar	: 11 unit
b. Madrasah Ibtidaiyah	: 2 unit
c. Sekolah Menengah Pertama	: 2 unit
d. Madrasah Tsanawiyah	: 5 unit
e. Sekolah Menengah Atas	: 1 unit
f. Madrasah Aliyah	: 5 unit

⁵² *Ibid*



Tabel 4

Jumlah SD, SMP, Dan SMA di Kecamatan Kuala Jambi Tahun 2019.⁵³

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Sekolah		
		SD	SMP	SMA
1.	Teluk Majelis	2	1	-
2.	Kampung Laut	3	-	-
3.	Tanjung Solok	4	1	1
4.	Kuala Lagan	1	-	-
5.	Majelis Hidayah	1	-	-
6.	Manunggal Makmur	-	-	-
	Jumlah	11	2	1

4. Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Kuala Jambi tahun 2018 adalah :

- a. Puskesmas : 1 unit
- b. Puskesmas Pembantu : 1 unit
- Polides : 4 unit⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan *Open Defecation Free* (Odf) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kelurahan Kampung Laut

Di dalam peraturan menteri kesehatan nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat, menetapkan penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.⁵⁵ Dan membuang air besar sembarangan atau yang di sebut dengan *open defecation free* (odf) di kelurahan kampung laut sudah menjadi kebiasaan warga untuk membuang air besar sembarangan kebiasaan yang di lakukan secara turun temurun oleh masyarakat disana, karena sebagian besar dari masyarakat Kelurahan Kampung Laut tidak mengetahui dampak bahaya dari membuang air besar sembarangan, dan juga faktor lingkungan tempat tinggal mereka adalah daerah perairan, yang menyebabkan mereka membuang air besar sembarangan maka menyebabkan dari mereka tidak menggunakan jamban yang layak untuk di gunakan, ini merupakan permasalahan yang harus di selesaikan secara serius, karena berdampak buruk bagi kesehatan warga Kelurahan Kampung Laut. Ada beberapa penerapan yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Kampung Laut untuk meningkatkan program *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut sebagai berikut :

⁵⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (4) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.



a. Pendataan Penduduk

Pendataan penduduk Secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang di peroleh dari kartu tanda penduduk yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek⁵⁶. Pendataan yang di lakukan oleh Kelurahan Kampung Laut ini bertujuan agar lebih memudahkan pemerintah untuk mengetahui apakah masyarakat Kelurahan Kampung Laut masih menggunakan jamban yang tidak layak, dengan itu pemerintah akan memberikan bantuan bagi mereka yang masih menggunakan jamban yang tidak.

Pemerintah Kelurahan Kampung Laut bekerjasama dengan pihak RT setempat melakukan pemetaan kepada warga Kelurahan Kampung Laut yang belum mempunyai jamban sehat, dan memberikan bantuan jamban yang layak bagi mereka yang belum mempunyai jamban tersebut. Wawancara dengan Ibu Zarlina selaku Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut ia menjelaskan penerapan program ODF di Kelurahan Kampung Laut sebagai berikut :

“Program *Open Defecation Free* (ODF) sudah berlangsung sejak tahun 2008, di Kelurahan Kampung Laut, pertama yang kami lakukan yaitu mendata penduduk Kelurahan Kampung Laut, setelah itu kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan terakhir kami memberikan bantuan jamban sehat bagi masyarakat yang belum menggunakan jamban sendiri ataulyang jamban yang tidak layak untuk di gunakan”.⁵⁷

Carl Friedrich mengatakan bahwa “kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau

⁵⁶<https://www.kompas.com/skala/read/2020/01/04/140000869/pengertian-sensus-penduduk-dan-data-sensus-indonesia>, akses 5 Januari 2021.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Zarlina selaku Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 10 November 2020 di tempat Kelurahan Kampung Laut.



pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan”. Berdasarkan teori yang di katakan Carl Friedrich tersebut dalam hal ini pemerintah Kelurahan Kampung Laut telah melakukan tindakan atau upaya untuk meningkatkan program *open defecation free* di Kelurahan Kampung Laut ini yaitu dengan melakukan pendataan penduduk.⁵⁸

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Selain itu sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok.⁵⁹

Pihak pemerintah Kelurahan Kampung Laut bekerjasama dengan Puskesmas Kelurahan Kampung Laut memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan dan dampak yang akan terjadi jika masih membuang air besar sembarangan.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Melisa selaku Lurah Kampung Laut, ia menjelaskan bagaimana sosialisasi program ODF tersebut sebagai berikut :

⁵⁸ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Faakta Realitas*, (Gorontalo; UNG Pers, 2015), hlm. 9

⁵⁹ <http://www.kompas.com/Skola/Read/2020/02/01/140000269/Sosialisasi-Pengertian-Proses-Fungsi-Dan-Tujuannya>, akses 5 Januari 2021.



“Kalau dari kelurahan kita bekerjasama dengan pihak puskesmas setempat untuk memberikan sosialisasi kepada warga kelurahan kampung laut, dan kami berharap dengan kerjasama ini bisa lebih memudahkan masyarakat memahami bahaya dan dampak yang diakibatkan membuang air besar sembarangan dan juga tidak menjaga kebersihan lingkungan”⁶⁰

Wawancara dengan Bapak Romi selaku pengawas kesehatan lingkungan ia menjelaskan program ODF di Kelurahan Kampung Laut sebagai berikut :

“Sejak adanya kordinasi yang di buat seperti lintas program pemberdayaan masyarakat untuk melakukan ofdf dengan lintas sektor, kita bekerjasama dalam mengupayakan *Open Defecation Free* di setiap Desa dan Kelurahan, terutama Kelurahan Kampung Laut ini sendiri yang masih banyaknya masyarakat membuang air besar sembarangan, disini kami memberikan pemahaman bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, dampak yang di sebabkan jika lingkungan tidak sehat, dan kami berharap masyarakat bisa memahaminya dan menerapkan di lingkungannya”.⁶¹

Berdasarkan wawancara dari informan di atas peneliti berpendapat bahwa dengan adanya kerjasama yang dilakukan pemerintah kelurahan kampung laut dengan pihak puskesmas untuk program *open defecation free* (odf) tersebut lebih memudahkan masyarakat memahami dampak buruk bagi kesehatan jika membuang air besar sembarangan dan mengetahui perkembangan persentase kesehatan masyarakat kelurahan kampung laut.

Edwards II mengatakan sesungguhnya kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program baik yang dilakukan atau tidak dilakukan, disini dapat dilihat dari pemerintah Kelurahan Kampung Laut berupaya melakukan program-program yang di tetapkan yang bertujuan untuk menjadikan Kelurahan Kampung Laut bersih dan sehat.

Wawancara dengan Ibu Sari warga kampung laut, ia menjelaskan bahwa program bantuan jamban yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut :

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Melisa selaku Lurah Kampung Laut, pada tanggal 10 November 2020 di tempat Kantor Lurah Kampung Laut.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Romi selaku Pengawas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 17 November 2020 di tempat Puskesmas Kampung Laut.



“Telah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat kelurahan kampung laut membuang air besar sembarangan, baru beberapa tahun terakhir ini pemerintah melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan jamban sehat bagi masyarakat, walaupun sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh tetapi sedikit berdampak bagi masyarakat dan kami sekarang menjadi tauh dampak buruk jika membuang air besar sembarangan. Dan saya berharap pemerintah lebih rajin memberikan sosialisasi seperti ini dan juga kami mendukung program pemerintah untuk stop membuang air besar sembarangan”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan adanya sosialisasi yang di berikan pemerintah untuk masyarakat sangat berdampak baik, karena dengan itu mereka menyadari akan bahayanya membuang air besar sembarangan terhadap kesehatan.dan menjadikan Kelurahan Kampung Laut sebagai Kelurahan yang bersih dan sehat.

c. Pemberian Bantuan Jamban Sehat

Pemerintah Kelurahan Kampung Laut selain memberikan sosialisasi mereka juga memberikan bantuan kepada warga yang tidak mempunyai jamban yang layak atau yang tidak berkualitas, bantuan berupa WC umum dan juga pembagian septiteng untuk warga sekitar.

Berbagai penerapan *open defecation free* di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kelurahan Kampung Laut ini berupa pemberian jamban dan juga septiteng di harapkan dapat optimal dalam penerimaan bantuannya. Pihak Kelurahan sendiri melakukan pendataan terlebih dahulu untuk warga yang layak mendapatkan bantuan jamban komunal itu sendiri .

Penerapan jamban sehat yang dilakukan pemeritah Kelurahan Kampung Laut ini harapkan berdampak baik bagi penerima bantuan. Dalam menjalankan

⁶² Wawancara dengan Sari selaku warga Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 7 November 2020 di tempat tinggal warga.



tugasnya pemerintah Kelurahan Kampung Laut memiliki target untuk mencapai kelima pilar STBM, dan juga dengan diberikannya bantuan jamban sehat ini diharapkan bisa memutus mata rantai penularan penyakit.

Wawancara dengan Bapak Bambang penerima bantuan jamban komunal, ia menjelaskan tentang program bantuan jamban yang berikan oleh pemerintah kepada dirinya sebagai berikut :

“Sebelum menggunakan jamban komunal ini saya menggunakan WC cemplung, tempatnya pun hanya seadanya saja, tidak memikirkan dampak buruknya bagi kesehatan, karena yang kami pikirkan hanya bagaimana cara membuang air besarnya saja tanpa memikirkan tempat yang layak, kesehatan untuk kita semua dan saya sangat berterimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan keluarga saya bantuan jamban komunal ini, sekarang kami telah memiliki jamban yang layak. Dan saya berharap bantuan ini bisa terus di berikan kepada masyarakat yang memang membutuhkannya”.⁶³

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Zarlina selaku Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut ia menjelaskan:

“Kalau di kelurahan Kampung Laut sendiri program ini berjalan dari tahun 2008 dan ada sebanyak 55 KK yang mendapatkan bantuan jamban sehat dari pemerintah dan untuk Wc umum ada 2 bantuan jamban. Tetapi untuk pelaksanaan program ini masih di daerah daratan untuk di daerah pesisir masih belum ada, itu terkendala lokasinya. Kami selaku pemerintah berupaya untuk agar seluruh masyarakat Kelurahan Kampung Laut bisa menggunakan jamban yang layak”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas penerima bantuan yang di berikan pemerintah Kelurahan Kampung Laut itu sangat bermanfaat, dan dengan adanya bantuan itu mereka mengharapkan untuk wilayah Kelurahan Kampung Luat dapat memutus mata rantai penyakit, dan juga mereka mengharapkan agar semua

⁶³ Wawancara dengan bapak bambang selaku penerima bantuan jamban, pada tanggal 11 November 2020 di tempat rumah warga.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Zarlina selaku Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 10 November 2020 di tempat Kantor Lurah Kampung Laut.



masyarakat Kelurahan Kampung Laut bisa mendapatkan bantuan jamban sehat tersebut. Dan pemerintah Kelurahan Kampung Laut berupaya agar seluruh masyarakat Kelurahan Kampung Laut menggunakan Jamban yang layak. Sehingga tidak ada lagi masyarakat Kelurahan Kampung Laut yang tidak mempunyai jamban yang sehat.

Tabel 5

Data Jumlah Pelaksanaan program ODF di kelurahan Kampung Laut (2010-2019)⁶⁵

No	Tempat Penerimaan Bantuan ODF	Bentuk Bantuan	Kondisi Geografis	Tahun	Jumlah
1	Rt 02	Wc Rumah (pribadi)	Daratan	2010	15 KK
2	Rt 03	Wc Rumah (pribadi)	Daratan	2012	12 KK
3	Rt 05	Wc Rumah (pribadi)	Daratan	2015	17 KK
4	Pondok Pesantren	Wc Umum	Daratan	2018	2 Buah
	Jumlah				57 jamban

Penerapan jamban sehat yang dilakukan pemerintah Kelurahan Kampung Laut ini diharapkan berdampak baik bagi penerima bantuan. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah Kelurahan Kampung Laut memiliki target untuk mencapai kelima pilar STBM, dan juga dengan diberikannya bantuan jamban sehat ini diharapkan bisa memutus mata rantai penularan penyakit.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, peneliti menilai bahwasanya pemerintah belum secara optimal melakukan program stop buang

⁶⁵ Sumber data Kelurahan Kampung Laut 2010-2019



air besar sembarangan ini di kelurahan kampung laut, dan kelurahan kampung laut juga belum ada fasilitator *open defecation free* (odf) sehingga hal ini turut mempersulit pelaksanaan program SBS dalam mewujudkan Kelurahan *open defecation free* (odf). Untuk melaksanakan program *open defecation free* (odf) harus ada kegiatan pemicuan oleh fasilitator terlatih dan bersertifikat. Upaya yang dilakukan hanya sesuai dengan kegiatan program kesehatan lingkungan puskesmas, sehingga cakupan kelurahan *open defecation free* (odf) di Kelurahan Kampung Laut belum maksimal. Padahal pemicuan sangat penting untuk percepat program *open defecation free* (odf), pemicuan dapat mempercepat perubahan tingkah laku sehat dari BABS jamban cemplung menjadi BAB yang menggunakan kloset yang sehat.⁶⁶

Berdasarkan observasi terhadap bantuan jamban sehat/WC umum yang diberikan Pemerintah Kelurahan Kampung Laut peneliti melihat bantuan ini sangat membantu masyarakat khususnya Pihak Pesantren untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan dan juga lebih bisa menjaga lingkungan, tetapi yang sangat di sayangkan kurang di rawatnya bantuan WC tersebut, dan di harapkan untuk lebih membersihkan atau merawatnya.

Gambar 1

Observasi di Pesantren Warisan Rasulullah Kelurahan Kampung Laut⁶⁷

⁶⁶ Buku Program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2018, hlm. 39

⁶⁷ Dokumentasi Observasi Peneliti, tanggal 10 November 2020, di Pesantren Warisan Rasulullah Kelurahan Kampung Laut





Salah satu pemberian bantuan Wc umum yang di berikan Pemerintah Kelurahan Kampung Laut untuk Pesantren Warisan Rasulullah yang berada di Kelurahan Kampung Laut, bantuan yang bermanfaat bagi para santri yang ada, tetapi sangat disayangkan bantuan yang telah di berikan tidak terlalu dirawat sehingga tampak sedikit kotor.

Tabel 6

**Perkembangan Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar
Sembarangan Kelurahan Kampung Laut⁶⁸**

No	Tahun	Jenis Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar Kelurahan Kampung Laut		
		Jamban Sendiri	Jamban Umum	Tidak Memiliki Jamban
1.	2017	998	-	40
2.	2018	1,010	1	27
3.	2019	1,022	1	15

⁶⁸ Sumber Kantor Desa/Kelurahan Kuala Jambi

Dapat di lihat pada tabel di atas fasilitas tempat pembuangan air besar sembarangan di Kelurahan Kampung Laut mengalami peningkatan di setiap tahunnya, walaupun masih ada beberapa rumah yang tidak memiliki jamban/jamban tidak layak pakai, pemerintah masih mengupayakan untuk semua masyarakat Kelurahan Kampung Laut untuk memiliki jamban sendiri. Dan dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa adanya peningkatan masyarakat Kelurahan Kampung Laut untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi Pemerintah Kelurahan Kampung Laut Dalam Program *Open Defecation Free* (Odf)

Pemerintah kelurahan kampung laut dalam melakukan pembagian bantuan jamban dan sosialisasi memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program *open defecation free* (odf).

a. Faktor Pendukung

faktor pendukung pemerintah Kelurahan Kampung Laut yaitu :

1. Kerjasama Pemerintah

Dengan adanya kerjasama dengan pihak RW, RT, dan Puskesmas Kelurahan Kampung Laut untuk meningkatkan program *Open Defecation Free* di Kelurahan Kampung Laut. Kerjasama yang di lakukan bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat akan bahayanya membuang air besar sembarangan dan juga agar masyarakat menjadi lebih meningkatkan lagi kebersihan lingkungan



Melisa selaku Lurah Kelurahan Kampung Laut menjelaskan kerjasama dengan pihak kesehatan Kelurahan Kampung Laut sebagai berikut :

“Kami pemerintah Kelurahan Kampung Laut melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak Instansi Pemerintahan lainnya, dan juga pihak Puskesmas untuk meningkatkan lagi masyarakat agar tidak membuang air besar sembarangan, dan lebih menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti yang di ketahui bahwa kebiasaan membuang air besar sembarangan itu telah menjadi turun temurun masyarakat Kelurahan Kampung Laut, dan kami berharap kerjasama yang di lakukan dengan pihak Puskesmas Kelurahan Kampung Laut bisa merubah pola pikir masyarakat untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan dan lebih bisa menjaga kebersihan lingkungannya”.⁶⁹

2. Dukungan Masyarakat

Sejak di berlakukannya program *open defecation free* di Kelurahan Kampung Laut Masyarakat juga mendukung program dengan mengikuti sosialisasi dan juga menjalankan program *Open Defecation Free* untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan.

Wawancara dengan Ibu Sari warga Kampung Laut, ia menjelaskan bahwa program bantuan jamban yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:

“Telah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat Kelurahan Kampung Laut membuang air besar sembarangan, baru beberapa tahun terakhir ini pemerintah melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan jamban sehat bagi masyarakat, walaupun sosialisasi yang di lakukan tidak menyeluruh tetapi sedikit berdampak bagi masyarakat dan kami sekarang menjadi lebih paham. Saya selaku masyarakat Kelurahan Kampung Laut sangat senang dengan sosialisasi yang di berikan karena kami sebagai orang awam menjadi tahu bahaya yang di sebabkan dari membuang air besar sembarangan, saya juga berharap agar sosialisasi ini bisa di lakukan secara menyeluruh di Kelurahan Kampung Laut, dan di lakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat”.⁷⁰

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Melisa selaku Lurah Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 10 November 2020 di tempat Kantor Lurah Kelurahan Kampung Laut.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Sari selaku warga Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 7 November 2020 di tempat tinggal warga.



b. Faktor Penghambat

faktor penghambat yang menyebabkan kurang optimalnya pemberian bantuan jamban sehat dan wc umumnya.

Munculnya kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. koordinasi dengan instansi pemerintah

Melisa selaku Lurah Kampung Laut menjelaskan tentang bagaimana koordinasi antar instansi pemerintah agar program STBM di Kelurahan Kampung Laut dapat mencapai tujuan yang diinginkan supaya dapat hidup lebih sehat sebagai berikut :

“Kami pemerintah kelurahan kampung laut mendorong peran aktif ketua RT untuk mengingatkan masyarakatnya untuk tidak membuang air besar sembarangan, pada setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat Pemerintah Kelurahan Kampung Laut memberitahukan kepada masyarakat agar tidak membuang air besar sembarangan lagi. Dan kami juga berharap masyarakat bisa melaksanakan apa yang telah kami buat”.⁷¹

Salah satu warga Kelurahan Kampung Laut menjelaskan tentang penyelenggaraan program STBM di Kelurahan Kampung Laut sebagai berikut :

“Saya rasa masih banyaknya warga yang membuang air besar sembarangan itu karena tidak adanya sanksi yang tegas yang di terima masyarakat jika masih ada yang membuang air besar sembarangan, dan juga tidak adanya pengawasan dari pihak RT setempat. Untuk melihat warga dan memberikan teguran bagi masyarakat yang membuang air besar sembarangan, jika di berikan sanksi atau teguran saya rasa masyarakat menjadi lebih peduli dengan lingkungannya dan setidaknya mereka takut untuk di berikan sanksi”.⁷²

Selanjutnya seorang warga Kelurahan Kampung Laut menjelaskan sebagai berikut:

⁷¹Wawancara dengan Ibu Melisa selaku Lurah Kampung Laut, pada tanggal 10 November 2020 di tempat Kantor Lurah Kampung Laut.

⁷²Wawancara dengan ibu Halima selaku warga Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 7 November 2020 ditempat rumah warga.



“Selama ini tidak adanya teguran yang tegas dari pihak kelurahan kampung laut maupun dari pihak RT kepada masyarakat yang membuang air besar sembarangan, begitu juga di lingkungan sekitar rumah saya. Masih ada sebagian warga yang membuang air besar sembarangan dan mereka tidak merasa takut karena tidak adanya teguran atau pun sanksi yang di berikan pemerintah”⁷³.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti mendapatkan masih ada koordinasi antar pemerintah masih belum optimal, koordinasi pemerintah Kelurahan Kampung Laut dengan instansi lainnya seperti Ketua Rw dan Ketua Rt, maka itu yang menyebabkan kurang optimalnya program yang di jalankan. Berdasrkan tujuan dari teori kebijakan publik adalah dapat di perolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Nilai nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik, dan harus sesuai dengan pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan,-keputusan, keputusan penetapan harga dan skenario pelaksanaan. Dan jika sistem pelaksanaanya kurang optimal akan berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Maka pentingnya sistem pelaksanaannya suatu organisasi di lakukan secara profesional agar tujuan dan sasaran program itu dapat tercapai.⁷⁴

Campbell J.P. mengatakan pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Disini pemerintah Kelurahan Kampung Laut belum berhasil melaksanakan program, karena masih ada masyarakat yang tidak menjalankan program yang telah di buat.

⁷³ Wawancara dengan bapak Ambo selaku warga Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 7 November 2020 di tempat rumah warga.

⁷⁴ Charles O Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 48.



2. Kondisi Geografis Kelurahan Kampung Laut

Tabel 7.

Data Letak Geografis dan jumlah rumah tangga Kecamatan Kuala Jambi ⁷⁵

No	Nama Kelurahan/ Desa	Kondisi Geografis	Jumlah Rumah
1	Teluk Majelis	Daerah Aliran Sungai	535
2	Kampung laut	Daerah aliran sungai	1.038
3	Tanjung Solok	Pesisir	1.109
4	Kuala Lagan	Pesisir	266
5	Majelis Hidayat	Daerah Aliran Sungai	373
6	Manunggal Makmur	Dataran	164

Pelaksanaan program STBM di Kelurahan Kampung Laut mempunyai kendala seperti yang dijelaskan melalui wawancara oleh Ibu Zarlina selaku Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut menjelaskan sebagai berikut :

“Ada beberapa permasalahan yang di hadapi pemerintah Kelurahan Kampung Laut terhadap pemberian bantuan jamban ini, karena masih ada beberapa masyarakat yang di pinggir laut yang belum mempunyai jamban sehat, kita belum memberikannya karena masih terkendala di lokasinya, dan juga kita membutuhkan septiteng yang besar, tapi kami terus berusaha agar masyarakat bisa mempunyai jamban yang layak digunakan, agar Kelurahan Kampung Laut menjadi bersih dan sehat”.⁷⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Melisa selaku Lurah Kelurahan Kampung Laut menjelaskan sebagai berikut :

“Kendala atau faktor penghambatnya program *open defecation free* atau stop buang air besar sembarangan yaitu kita masih kekurangan beberapa alat untuk membuat jamban yang layak digunakan untuk di sekitaran

⁷⁵ Sumber Kantor Desa/Kelurahan Kuala Jambi

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Zarlina selaku Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 10 November 2020 di tempat Kantor Lurah Kelurahan Kampung Laut.



pesisir, dan juga karena kondisi geografisnya dan kami masih berupaya agar semua masyarakat Kelurahan Kampung Laut menggunakan Jamban yang layak, dan menjadikan Kelurahan Kampung Laut menjadi Kelurahan yang bersih dan sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit”.⁷⁷

Wawancara Bapak Rizki selaku warga Kelurahan Kampung Laut, ia menjelaskan program pembagian jamban sehat kepada masyarakat di Kelurahan Kampung Laut sebagai berikut :

“Saya sebetulnya termasuk warga yang telah terdata untuk mendapatkan bantuan jamban sehat dari pemerintah Kelurahan Kampung Laut, tetapi sampai sekarangpun pemberian jamban sehat itu belum di berikan kepada saya di karena terkendala kondisi tempat tinggal saya saat ini di pinggiran laut. Dan saya lihat warga yang tinggal di darat sudah mendapatkan bantuan jamban sehat dari pemerintah, saya berharap pemerintah dapat mencari solusi dari permasalahan ini agar kami bisa segera mempunyai jamban yang layak di gunakan, kami juga sangat berharap dengan pemerintah karena saya dan keluarga tidak mempunyai dana untuk membuat jamban itu dan saya sendiri sangat mendukung program yang di buat pemerintah”.⁷⁸

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, permasalahan yang di hadapi pemerintah itu ialah kondisi geografis di Kelurahan Kampung Laut yang sulit untuk pembuatan jamban sehat ini. Penyelenggaraan program STBM yang dilakukan pemerintah yang terkendala kondisi geografis peneliti menilai bahwa seperti masyarakat yang tinggal di pinggiran laut yang sulit mendapatkan bantuan Jamban sehat dari pemerintah. peneliti menilai pemerintah harus mengatasi kendala tersebut agar masyarakat yang berada di pinggiran laut dapat hidup sehat dan tujuan program STBM dapat dilaksanakan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Melisa selaku Lurah Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 10 November 2020 di tempat Kantor Lurah Kelurahan Kampung Laut.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Rizki selaku warga Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 7 November 2020 di tempat rumah warga



3. Budaya Hidup Sehat yang Belum Optimal

Wawancara dengan Bapak Romi selaku Pengawas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan Kampung Laut, ia menjelaskan bahwa budaya masyarakat di Kelurahan Kampung Laut yang masih banyak yang belum menerapkan budaya hidup sehat sebagai berikut :

“Seperti yang kita ketahui telah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat Kelurahan Kampung Laut membuang air besar sembarangan, sulit bagi kita untuk memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarangan karena itu adalah kebiasaan yang mereka lakukan sedari dulu, tapi walaupun begitu kami tetap memberikan pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dan berusaha untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit yang akan di sebabkan dari membuang air besar sembarangan”.⁷⁹

Wawancara dengan Ibu Yuli selaku masyarakat Kelurahan Kampung Laut, ia menjelaskan sebagai berikut :

“Pada saat sebelum adanya program STBM ini, masyarakat di sini khususnya di lingkungan RT disini kalau untuk BAB masih ada sebagian yang tidak mempunyai jamban sehat dan memakai jamban cemplung ataupun membuang air besar sembarangan. Dan saya pun masih memakai jamban cemplung untuk di rumah saya, kami tidak mempunyai dana untuk membuat jamban yang layak, dan kami hanya menggunakan jamban seadanya saja seperti jamban cemplung”.⁸⁰

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Darma Satria selaku Kepala Puskesmas Kelurahan Kampung Laut menjelaskan sebagai berikut :

“Kami pihak puskesmas bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan Kampung Laut menjalankan program *open defecation free* (odf) ini di Kelurahan Kampung Laut untuk membiasakan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan, dengan memberikan sosialisasi kepada warga Kelurahan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Romi selaku Pengawas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 17 November 2020 di tempat Puskesmas Kelurahan Kampung Laut

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Yuli selaku warga Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 7 November 2020 di tempat rumah warga.



Kampung Laut. Agar mereka semua bisa memahai, mengetahui dampak buruk yang disebabkan oleh membuang air besar sembarangan”⁸¹.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Kampung Laut untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan, karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun mereka membuang air besar sembarangan, walaupun begitu Pemerintah Kelurahan Kampung Laut dengan Pihak Puskesmas tetap berusaha untuk melakukan atau memberikan pengetahuan, sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan. Dan di harapkan semua masyarakat bisa memahami bahaya dari membuang membuang air besar sembarangan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) ODF dikelurahan kampung laut, yang telah mendukung program *Open Defecation Free* (ODF) tahun 2008-2019, berdasarkan data yang di peroleh seperti pada tabel berikut :

Tabel 8
Jumlah pegawai pemerintah keluraham kampung laut⁸²

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1 (S1)	3
2	Sarjana Muda	1
3	SLTA	2
4	SLTP	-
5	SD	-

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Darma Satria selaku kepala Puskesmas Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 17 November 2020 di tempat Puskesmas Kelurahan Kampung Laut

⁸² Sumber Data Jumlah Pegawai Kelurahan Kampung Laut 2019



Berdasarkan tabel 4. Terlihat bahwa jumlah maupun tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada belum memadai dibandingkan dengan ruang lingkup tugas yang dijalankan. Terkait dengan penerimaan bantuan jamban sehat untuk Kelurahan Kampung Laut yang tergolong padat yaitu Kelurahan Kampung Laut mempunyai 4 RW dan 20 RT.

Berdasarkan teori efektifitas menurut Campbell J.P. pengukuran efektifitas secara umum dan paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸³

Berdasarkan teori efektifitas di atas peneliti berpendapat bahwa program STBM yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Kampung Laut dan dinas terkait, program tersebut belum efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya seperti pelaksanaan program pemberian jamban sehat kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki jamban maupun masyarakat yang masih memakai jamban cemplung di Kelurahan Kampung Laut. Masih banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah yang membuat belum efektifnya pelaksanaan program STBM.

⁸³ Yudhi Iestana, "Efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015" *jurnal ilmu pemerintahan dan kebijakan publik*, Vol. 03. No. 3, (Oktober 2016), hlm. 373.



C. Solusi Pemerintah Dalam Meningkatkan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut

Pelaksanaan program *Open Defecation Free* di Kelurahan Kampung Laut memiliki hambatan ataupun kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Agar pelaksanaan program bantuan jamban sehat yang diberikan kepada masyarakat dapat mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah memiliki solusi atas permasalahan yang ada, dengan memberikan bantuan jamban sehat, septitenk, Wc umum, dan juga memberikan sosialisasi bagi masyarakat agar mempercepat peningkatan program *Open Defecation Free*.

1. Pemberian Sanksi

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya), tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara, hukum imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.⁸⁴

berikut ini penjelasan dari Ibu Melisa selaku Lurah Kelurahan Kampung Laut menjelaskan sebagai berikut :

“Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat kami juga mengharapkan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah seperti Rw, Rt untuk meningkatkan lagi program *Open Defecation Free* (ODF) dengan memberikan pengetahuan atau teguran kepada masyarakat yang masih melanggar program ini dengan memberikan sanksi kepada mereka, dengan begitu akan memberikan efek jera kepada mereka yang melanggarnya. dan ini akan kami terapkan untuk di setiap Rt jika masih adaarganya yang

⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Jakarta, hlm. 1265.



melakukan pembuangan air besar sembarangan maka akan di berikan sanksi dengan begini akan sedikit membantu mempercepat peningkatan program *open defecation free* di Kelurahan Kampung Laut”.⁸⁵

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rhomy selaku Pengawas Kelurahan Kampung Laut sebagai berikut :

“Dari hasil peninjauan, sosialisasi yang kami berikan disini kami melihat tidak adanya sanksi ataupun efek jera yang di berikan pemerintah Kelurahan Kampung Laut kepada masyarakatnya, dan kami berharap agar pemerintah Kelurahan Kampung Laut lebih tegas lagi dalam penerapan programnya, agar program yang di lakukan berhasil”.⁸⁶

2. Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka mebuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.⁸⁷

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Herlina selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Kampung Laut menjelaskan sebagai berikut :

“Karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat hidup sehat, sikap, kepemilikan jamban dan dukungan keluarga dalam bertingkah laku sehat. Pemerintah juga menyediakan kebutuhan sanitasi dasar, agar setiap rumah bisa memiliki sarana air bersih dan jamban/kakus sehat. Ketersediaan sanitasi dasar di setiap rumah yang di upayahkan fasilitator sangat penting untuk mengubah sikap dan perilaku tidak sehat menuju sikap dan tingkah laku sehat, dan maka dari itu kami akan memberikan fasilitator *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut ini”.⁸⁸

Wawancara dengan Bapak Ambo selaku warga Kelurahan Kampung Laut sebagai berikut :

“Seharusnya dari pihak Kelurahan Kampung Laut sendiri memberikan semacam penghargaan kepada masyarakatnya yang memberikan dampak

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Melisa selaku Lurah Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 10 November 2020 di tempat Kantor Lurah Kelurahan Kampung Laut.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Rhomy selaku Pengawas Kesehatan Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 17 November 2020 di tempat Puskesmas Kelurahan Kampung Laut.

⁸⁷ <https://pkbidkijakarta.org/menjadi-fasilitator>, akses 25 Januari 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Herlina selaku Sekretaris Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 10 November 2020 di tempat Kantor Lurah Kelurahan Kampung Laut.

positif atau pengaruh positif kepada masyarakat lain untuk menjaga kebersihan di Kelurahan Kampung Laut ini, agar mereka lebih bersemangat lagi untuk memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, dan pastinya masyarakat lain juga akan terpengaruh dan berlomba-lomba juga agar bisa mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kelurahan Kampung Laut sendiri”.⁸⁹

Menurut teori kebijakan, telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang di inginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.⁹⁰

Berdasarkan teori kebijakan publik tahapan evaluasi merupakan suatu tahapan yang penting untuk menilai sebuah kebijakan mencapai tujuan dan sasaran atau tidak. Melihat teori yang ada penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Kampung Laut harus mengevaluasi kebijakan penerima bantuan jamban sehat. Penerima jamban sehat memiliki beberapa kendala, munculnya faktor kendala yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Menurut Palumbo *problem solving* adalah fungsi dari cara bagaimana stimulus tertentu menjadi *in-put* melalui sistem sensori ingatan, diproses dan dikoding melalui memori kerja (*working memory/short term memory*) dan disimpan bersama asosiasi-asosiasi dan peristiwa-peristiwa (*histories*) yang sekeluarga dalam memori jangka panjang (*Long Term Memory*). Sedangkan

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ambo selaku warga Kelurahan Kampung Laut, pada tanggal 7 November 2020 di tempat rumah warga.

⁹⁰ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 49



menurut Girl dkk menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penerapan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk mencapai tujuan.⁹¹

Bedasarkan teori problem solving di atas peneliti berpendapat bahwa pemecahan masalah (solusi) tergantung bagaimana pengetahuan sumber daya manusia yang ada dan keterampilan SDM untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di program STBM. Pemerintah baik dari kelurahan, kecamatan maupun Dinas yang terkait dapat mengoptimalkan pengetahuan dan keterampilan SDM. Agar pelaksanaan program dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah Kelurahan Kampung Laut untuk menjadikan Kelurahan Kampung Laut sebagai Kelurahan yang sehat dan bersih, salah satunya dengan tidak lagi membuang air besar secara sembarangan.

⁹¹ Bambang Suteng Sulasamono, "Probleng solving, Signifikasi, Pengertian dan Ragamnya" *jurnal fkip universitas kristen satya wacana*, Vol. 28. No. 2, (Desember 2012), hlm. 161.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesehatan dan penerima bantuan jamban sehat mengalami peningkatan setelah pemerintah Kelurahan Kampung Laut memberikan sosialisasi dan juga memberikan bantuan WC umum dan memberikan jamban sehat bagi masyarakat yang belum mempunyai WC yang layak. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan Stop Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* (ODF) secara lebih rinci sebagai berikut :

1. Penerapan pelaksanaan program *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Kampung Laut sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang masih menggunakan jamban yang tidak layak pakai.
- b. Memberikan sosialisasi kepada warga untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan.
- c. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mempunyai jamban yang layak.

2. Pelaksanaan program *Open Defecation Free* (ODF) mengalami kendala dalam melaksanakan pemberian bantuan jamban kepada masyarakat. Faktor penyebab munculnya kendala yang dihadapi pemerintah Kelurahan Kampung Laut :



- a. Koordinasi antar pemerintah yang masih belum optimal
- b. Lokasi yang sulit di jangkau karena dipinggir laut
- c. Kurangnya alat untuk pembuatan jamban di pinggir laut

3. Solusi atas tidak tercapainya target pelaksanaan program *Open Defecation Free* (ODF) sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan rutin sosialisasi kepada masyarakat
- b. Memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat jika melanggar peraturan yang telah dibuat, untuk tidak membuang air besar sembarangan

B. Saran

Setelah peneliti menguraikan dari pembahasan, kemudian menarik kesimpulan melalui tulisan ini peneliti mengajukan saran yang mungkin dapat digunakan :

1. Bekerjasama dengan Pemerintah setempat memberikan penghargaan bagi warga yang patuh untuk menjaga lingkungan tidak membuang air besar sembarangan.
2. Memberikan penyuluhan di tiap Rt untuk tidak membuang air besar sembarangan
3. Selain itu mengevaluasi kebijakan yang telah ada untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kelurahan Kampung Laut ataupun mempertegas hukuman bagi masyarakat yang masih membuang Air Besar Sembarangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. REFERENSI

- Apri Fitrianti, *Kesehatan Masyarakat Sanitasi dan Lingkungan*, Surakarta: PT Borobudur Inspirasi Nusantara, 2016.
- Buku Program Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2018. Dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kampung Laut.
- Charles O Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, cet.ke-3*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksra, 2004.
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet: Ke-1 Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasinya*, Malang: YA3, 1990.
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah press, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RNB*, Bandung: AlfaBeta, 2013.
- Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014.
- Waryana, *Promosi Kesehatan, Penyusunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Nuha medika Tahun 2016.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- William N Dun, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Yulianto Kadji. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan*



Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Bermasyarakat.

C. SUMBER LAINNYA

Nurul Siti Fatonah, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Pertama *Stop Babs* di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2015”, Skripsi Negeri Semarang, Tahun 2016.

Rena Retri Anggoro, “Gambaran Perilaku Buang Air Besar Sembarangan pada Masyarakat Desa Jatimulyo, Kabupaten Bojonegoro”, Skripsi Universitas Airlangga, Tahun 2017.

Verdiana Dwi Juniantin, “Kajian Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2014”, Skripsi Universitas Jember, Tahun 2014.

Bambang Suteng Sulasamono, “Probleng Solving, Signifikasi, Pengertian dan Ragamnya” *Jurnal Fkip Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol. 28, Desember 2012.

Della Putri Arifianty, “Peran Pemerintah Lokal Dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat Studi Tentang Keberhasilan Pogram *Open Defecation Free* di Kabupaten Bojonegoro” *jurnal peran pemerintah lokal* Vol. 03, Desember 2006.

Siti Sholikhah, “Hubungan Pelaksanaan Program *Open Defecation Free* Dengan Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Buang Air Besar Di Luar Jamban Di Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012” *jurnal surya* Vol. 2 No. XVIII, Juni 2014.

Wahyu Afiatul Qudsiyah dan Pujiati Rahayu Sri, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingginya Angka *Open Defecation OD* di Kabupaten Jember” *Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 3 No. 2 Mei 2015.

Yudhi Lestanata, “Efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Rumah Tangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik* Vol. 03 No. 3, Oktober 2016

<http://dpupkp.bantulkab.go.id/berita/205-dampak-sanitasi-buruk> , akses 17 februari 2020

<http://www.kompas.com/skola/read/2020/02/01/140000269/sosialisasi-Pengertian-proses-fungsi-dan-tujuannya> , akses 5 Januari 2021.

<http://wartakota.tribunnews.com/amp/2013/12/13/kemenkes-targetkan-sanitasi-total-indonesia-id-2015#referrer=https://www.google.com>, akses 11 Januari 202, akses 11 Januari 2020

<https://tanjabtimkab.go.id/>, akses 23 Desember 2019



Lampiran 2. Data Informan penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Melisa, S. Stp	Lurah Kelurahan Kampung Laut
2	Zarlina, S. Ip	Kepala Seksi Kelurahan Kampung Laut
3	Herlina	Sekretaris Kelurahan Kampung Laut
4.	Darma Satria, S.Farm. ME. Apt	Kepala Puskesmas Kelurahan Kampung Laut
5.	Rhomy. S, A. Md. KL	Pengawas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan Kampung Laut
6.	Bapak Rizki	Pedagang
7.	Bapak Anton	Pedagang
8.	Bapak Bambang	Pedagang
9.	Bapak Ambo	Buruh
10.	Ibu Sari	Ibu Rumah Tangga
11.	Ibu Halima	Pedagang
12.	Ibu Yuli	Ibu Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Penelitian



Foto bersama Bapak Darma Satria, S.Farm. ME. Apt dan Bapak Rhomy. S, A. Md. KL



Foto bersama Ibu Melisa, S. Stp



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Sri Rejeki
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Laut, 8 Mei 1998
NIM : SIP. 162481
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Golongan Darah : O
Alamat : Perum Alam Citra 2 Blok N12 rt 021 Rw 00,
Mekar jaya Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
No. Hp : 085609790136
Nama Ayah : Zainal
Nama Ibu : Fatimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, tahun lulus : SD Negeri 30 Kelurahan Kampung Laut (2010).
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur (2013)
 - c. SMA, tahun lulus : SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur (2016)

